

PEMERATAAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD NUH DAN ABDUL MU'TI: KAJIAN KOMPARATIF ATAS GAGASAN DAN IMPLEMENTASI SEKOLAH RAKYAT SEBAGAI MODEL PENDIDIKAN ALTERNATIF

Rizky Firnanda^{*1}, Dinda Nurviana², Fikri Fathul Aziz³, Fathya Shafa Diani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Indonesia

Email: firmandarizky88@gmail.com¹, nurvianadinda166@gmail.com², fikrifathula@gmail.com³, fathyashafad@gmail.com⁴

Abstract: *Equitable access to quality education remains a challenge in Indonesia, especially for marginalized communities. In this context, various alternative education initiatives have emerged, one of which is the People's School. This study aims to examine the idea and implementation of the People's School as a solution to educational inequality, through the perspectives of two national education figures, namely Muhammad Nuh and Abdul Mu'ti. The research problem formulation in this study is: how do Muhammad Nuh and Abdul Mu'ti view the equitable distribution of quality education and how the implementation of the People's School in realizing this idea. The method used is descriptive qualitative with a literature study approach and in-depth interviews with relevant informants. The results show that Muhammad Nuh emphasizes the importance of systemic transformation through state policy, while Abdul Mu'ti focuses more on strengthening the role of civil society and values-based education. The implementation of the People's School is considered in line with the ideas of both, but emphasizes Abdul Mu'ti's community-based approach. The People's School is able to reach marginalized communities and provide contextual and inclusive education. In conclusion, the People's School can be a relevant alternative education model in efforts to equitable distribution of quality education, especially when combined with strategic state policies and community empowerment.*

Keywords: *Equalization Of Education, People's School, Muhammad Nuh, Abdul Mu'ti.*

Abstrak: Pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan di Indonesia, terutama bagi masyarakat marginal. Dalam konteks ini, muncul berbagai inisiatif pendidikan alternatif, salah satunya adalah Sekolah Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji gagasan dan implementasi Sekolah Rakyat sebagai solusi terhadap ketimpangan pendidikan, melalui perspektif dua tokoh pendidikan nasional, yaitu Muhammad Nuh dan Abdul Mu'ti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pandangan Muhammad Nuh dan Abdul Mu'ti mengenai pemerataan pendidikan berkualitas dan bagaimana penerapan Sekolah Rakyat dalam mewujudkan gagasan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap informan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammad Nuh menekankan pentingnya transformasi sistemik melalui kebijakan negara, sementara Abdul Mu'ti lebih menyoroti penguatan peran masyarakat sipil dan pendidikan berbasis nilai. Implementasi Sekolah Rakyat dinilai sejalan dengan gagasan keduanya, namun lebih menonjolkan pendekatan Abdul Mu'ti yang berbasis komunitas. Sekolah Rakyat mampu

menjangkau masyarakat yang terpinggirkan dan memberikan pendidikan kontekstual serta inklusif. Kesimpulannya, Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan alternatif yang relevan dalam upaya pemerataan pendidikan berkualitas, terutama jika dikombinasikan dengan kebijakan strategis negara dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Pemerataan Pendidikan, Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, Abdul Mu'ti.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945. Namun dalam praktiknya, akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal. Ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah maju dan daerah kurang berkembang menunjukkan adanya jurang struktural yang belum teratasi secara tuntas. Pemerataan pendidikan bukan hanya tentang kesempatan bersekolah, tetapi juga menyangkut kualitas pengajaran, ketersediaan sumber daya, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat lokal. (Ma'ruf, 2021)

Berangkat dari realitas tersebut, muncul berbagai inisiatif pendidikan alternatif yang berupaya mengisi kekosongan yang tidak mampu dijangkau oleh sistem pendidikan formal. Salah satu model yang berkembang adalah Sekolah Rakyat, yakni bentuk pendidikan berbasis masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai lokal, partisipasi komunitas, dan pendekatan yang lebih inklusif. Sekolah Rakyat telah banyak diterapkan oleh organisasi sosial dan kelompok masyarakat sipil sebagai bentuk perlawanan terhadap eksklusivitas pendidikan formal yang seringkali kurang adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat marginal. (Zakaria, 2018)

Dalam konteks pemikiran pendidikan nasional, dua tokoh yang cukup berpengaruh dalam wacana pemerataan pendidikan adalah

Muhammad Nuh dan Abdul Mu'ti. Muhammad Nuh, sebagai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, banyak mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada transformasi sistem pendidikan nasional melalui pendekatan teknologi dan peningkatan mutu. Di sisi lain, Abdul Mu'ti, seorang akademisi dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dan pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman serta kemanusiaan universal. Keduanya memiliki fokus yang berbeda, namun sama-sama memperjuangkan akses pendidikan yang adil dan merata. (Asyibli et al., 2025)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif gagasan Muhammad Nuh dan Abdul Mu'ti mengenai pemerataan pendidikan berkualitas, serta menelaah bagaimana konsep-konsep tersebut tercermin dalam praktik implementasi Sekolah Rakyat. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan titik temu yang konstruktif antara kebijakan negara dan gerakan masyarakat sipil dalam memperluas akses pendidikan yang berkeadilan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menciptakan sinergi antara pemikiran strategis dari para pengambil kebijakan dengan gerakan akar rumput dalam mewujudkan pendidikan yang tidak hanya merata secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan relevan secara sosial. Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan alternatif dapat menjadi jembatan antara negara dan rakyat

dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

a. Pemerataan Pendidikan Berkualitas

Pemerataan pendidikan merupakan proses memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang layak. Konsep ini mencakup distribusi yang adil terhadap fasilitas pendidikan, tenaga pendidik yang kompeten, serta kurikulum yang relevan. Pemerataan pendidikan berkualitas tidak hanya menekankan pada jumlah sekolah atau siswa yang bersekolah, melainkan juga pada kesetaraan dalam hasil belajar dan kesempatan berkembang. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan daya saing bangsa dalam jangka panjang. (Suryana, 2020)

b. Pendidikan Alternatif dan Sekolah Rakyat

Pendidikan alternatif hadir sebagai respons terhadap keterbatasan sistem pendidikan formal. Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk pendidikan alternatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, bersifat partisipatif, dan seringkali dijalankan oleh komunitas atau organisasi masyarakat sipil. Sekolah Rakyat tidak hanya mengajarkan materi akademik, tetapi juga membentuk karakter, kesadaran sosial, dan kemampuan hidup. Model ini dinilai fleksibel, kontekstual, dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang terpinggirkan oleh sistem formal. (Safarah & Wibowo, 2018)

c. Gagasan Pendidikan Muhammad Nuh

Gagasan pendidikan dalam perspektif Muhammad Nuh menekankan pada pembangunan sistem yang adaptif terhadap

perkembangan teknologi dan globalisasi. Pendidikan harus berorientasi pada peningkatan mutu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pelatihan guru. Pemerataan pendidikan dilakukan melalui kebijakan strategis seperti BOS, UN, dan sertifikasi guru, dengan tujuan menciptakan sistem pendidikan nasional yang efisien dan terstandar. (dkk & Maryani, 2021)

d. Gagasan Pendidikan Abdul Mu'ti

Pemikiran pendidikan Abdul Mu'ti berakar pada nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pendidikan menurutnya bukan sekadar alat mobilitas sosial, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan pembangunan peradaban. Abdul Mu'ti menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan, transformatif, dan berbasis nilai, serta mengajak masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam proses pendidikan. Pemerataan pendidikan dicapai melalui kolaborasi antara negara, masyarakat, dan institusi keagamaan. (Rohendi, 2011)

e. Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pendidikan berbasis masyarakat menempatkan komunitas sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan. Pendekatan ini memperkuat relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal dan membangun kemandirian warga dalam menciptakan ruang belajar yang inklusif. Sekolah Rakyat menjadi contoh konkret dari pendekatan ini, yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan solidaritas sosial dan kesadaran kritis. (FADHLULLAH, n.d.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan gagasan dua tokoh

pendidikan Indonesia, yaitu Muhammad Nuh dan Abdul Mu'ti, dalam konteks pemerataan pendidikan berkualitas, serta implementasinya dalam model Sekolah Rakyat sebagai bentuk pendidikan alternatif. Penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan hasil penelitian, serta wawancara dan ceramah kedua tokoh yang dipublikasikan secara resmi.

Data yang dikumpulkan bersumber dari karya tulis asli masing-masing tokoh, baik dalam bentuk tulisan akademik maupun pendapat mereka yang tertuang dalam forum publik. Selain itu, data sekunder yang berupa hasil penelitian sebelumnya tentang Sekolah Rakyat dan pendidikan alternatif juga digunakan untuk menguatkan analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan teks dan sumber informasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Proses analisis dilakukan melalui identifikasi tema, pengelompokan konsep, dan perbandingan pemikiran antar tokoh, untuk menemukan titik temu dan perbedaan pandangan mereka terhadap pemerataan pendidikan.

Validitas data dalam penelitian ini diperkuat dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi, serta dengan menelaah literatur dari berbagai sudut pandang yang kredibel dan akademis. (Arifin, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gagasan Pemerataan Pendidikan dalam Perspektif Muhammad Nuh

Muhammad Nuh merupakan salah satu tokoh penting dalam bidang pendidikan di

Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Gagasannya tentang pemerataan pendidikan berangkat dari pandangan bahwa pendidikan adalah alat utama untuk memutus rantai kemiskinan, memperkuat daya saing bangsa, dan mendorong kemajuan peradaban. Dalam berbagai forum dan tulisan, Muhammad Nuh menekankan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebagai penyediaan akses fisik terhadap sekolah, tetapi juga harus mencakup kesetaraan dalam kualitas pendidikan, distribusi sumber daya, dan hasil belajar siswa. (Tamimah & Nuh, 2023)

Salah satu kebijakan utama yang digagas Muhammad Nuh untuk mencapai pemerataan adalah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini dirancang untuk meringankan beban biaya pendidikan dasar bagi siswa dari kalangan ekonomi lemah. Dengan BOS, sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di daerah tertinggal, mendapatkan dana langsung dari pemerintah pusat. Gagasan ini berangkat dari asumsi bahwa salah satu hambatan utama akses pendidikan adalah biaya. Melalui subsidi langsung kepada sekolah, pemerintah berharap semua siswa dapat bersekolah tanpa terkendala faktor ekonomi. Ini menjadi salah satu strategi pemerataan dalam aspek aksesibilitas.

Namun, bagi Muhammad Nuh, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dari sisi biaya. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, dalam masa kepemimpinannya, ia menggagas sertifikasi guru dan ujian kompetensi guru sebagai bagian dari upaya menjamin bahwa seluruh siswa, di manapun mereka berada, mendapat pengajaran dari tenaga pendidik yang memiliki standar kompetensi minimal yang sama. Sertifikasi guru bukan hanya bentuk

penghargaan terhadap profesi guru, tetapi juga mekanisme untuk memastikan pemerataan kualitas layanan pendidikan. Dalam pandangannya, guru adalah kunci utama dalam menciptakan pendidikan yang adil dan berkualitas. (Lubis, 2018)

Terlepas dari itu, secara umum pendekatan Muhammad Nuh mencerminkan strategi pemerataan pendidikan yang terstruktur dari atas (*top-down*), dengan mengandalkan regulasi, standarisasi, dan subsidi pemerintah. Ia percaya bahwa pemerataan tidak dapat dicapai hanya melalui inisiatif komunitas, melainkan harus dijalankan melalui sistem pendidikan nasional yang solid, terukur, dan terintegrasi. Dalam kerangka besar, Muhammad Nuh melihat pendidikan sebagai tanggung jawab negara yang harus dijalankan secara profesional dengan prinsip akuntabilitas.

Dalam konteks implementasi, kebijakan-kebijakan yang digagas oleh Muhammad Nuh memang berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah dan memperluas akses, terutama di jenjang pendidikan dasar. Namun, tantangan pemerataan kualitas masih menjadi pekerjaan rumah. Oleh karena itu, pemikirannya tentang pemerataan pendidikan dapat menjadi dasar yang kuat jika dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual, sebagaimana ditawarkan oleh model pendidikan berbasis masyarakat seperti Sekolah Rakyat. (Rina et al., 2018)

Dengan demikian, gagasan Muhammad Nuh tentang pemerataan pendidikan berkualitas memberikan kontribusi penting dalam pembangunan sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif dan efisien. Strategi yang ia dorong berbasis pada struktur kebijakan negara dan penguatan sistem, namun ke depannya tetap memerlukan pengembangan model yang lebih

adaptif terhadap dinamika sosial di tingkat akar rumput.

B. Gagasan Pemerataan Pendidikan dalam Perspektif Abdul Mu'ti

Abdul Mu'ti adalah seorang akademisi dan tokoh pendidikan yang memiliki pandangan khas dalam memperjuangkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus dosen, ia dikenal sebagai pemikir pendidikan yang konsisten menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan, inklusif, dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pandangannya, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari aspek fisik seperti jumlah sekolah atau bantuan biaya, tetapi harus dilihat dari bagaimana pendidikan mampu membentuk manusia yang utuh: berilmu, berakhlak, serta memiliki kesadaran sosial.

Salah satu gagasan utama Abdul Mu'ti adalah pentingnya pendidikan berbasis nilai dan spiritualitas. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas harus memperhatikan aspek moral dan etika, bukan semata-mata prestasi akademik atau pencapaian kurikulum. Dalam konteks pemerataan, ia mengingatkan bahwa kelompok-kelompok masyarakat marginal sering kali tidak hanya tertinggal secara ekonomi, tetapi juga termarginalkan secara sosial dan budaya. Oleh karena itu, pendidikan harus hadir untuk mengangkat martabat mereka melalui pendekatan yang humanis, bukan hanya sekadar formalitas administratif. (Afifuddin, 2020)

Berbeda dari pendekatan negara yang bersifat *top-down*, Abdul Mu'ti lebih menekankan pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*). Dalam pandangannya, pendidikan yang efektif dan merata justru tumbuh dari bawah, melalui partisipasi aktif masyarakat. Ia melihat bahwa masyarakat lokal lebih memahami kebutuhan

dan konteks kehidupan mereka sendiri, sehingga pendidikan yang muncul dari kesadaran kolektif komunitas akan lebih relevan dan berkelanjutan. Dalam hal ini, ia menilai bahwa model pendidikan alternatif seperti Sekolah Rakyat adalah wujud konkret dari pemerataan pendidikan berbasis masyarakat. Sekolah semacam itu mampu menjangkau kelompok yang tidak tersentuh oleh sistem formal dan memberikan ruang pembelajaran yang lebih terbuka, kontekstual, serta tidak diskriminatif. (Anwar & Mubin, 2022)

Abdul Mu'ti juga berpandangan bahwa peran organisasi masyarakat keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lainnya sangat strategis dalam memperluas akses pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak boleh menjadi monopoli negara, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Lembaga-lembaga keagamaan memiliki sejarah panjang dalam membangun lembaga pendidikan, bahkan di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, ia mendorong agar negara membuka ruang kolaborasi yang luas dengan ormas dan lembaga sosial untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang sejati.

Abdul Mu'ti juga sangat menekankan aspek pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan. Menurutnya, guru bukan hanya agen penyampai informasi, tetapi agen perubahan sosial. Maka dari itu, peningkatan kapasitas guru, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), harus dilakukan bukan hanya dari segi teknis pedagogi, tetapi juga dalam membangun kesadaran sosial dan kepedulian terhadap kondisi anak didik. Ia percaya bahwa pendidikan yang memanusiakan peserta didik hanya mungkin terjadi jika para pendidiknya juga diperlakukan secara manusiawi dan sejahtera secara layak. (Rosyadi et al., 2021).

Gagasan Abdul Mu'ti sangat relevan dengan berbagai tantangan pemerataan pendidikan saat ini. Ketika pendekatan negara kerap kali gagal menjangkau lapisan masyarakat bawah, pendekatan berbasis komunitas dan nilai yang ia dorong justru terbukti berhasil dalam menciptakan ruang-ruang belajar alternatif. Salah satu contohnya adalah program-program pendidikan informal dan nonformal yang dijalankan oleh Muhammadiyah, seperti sekolah gratis, program literasi, dan pelatihan vokasional yang ditujukan bagi kelompok masyarakat miskin dan terlantar.

Lebih jauh, Abdul Mu'ti menekankan bahwa pemerataan pendidikan harus bersifat transformatif. Artinya, pendidikan tidak hanya memberi keterampilan dan pengetahuan, tetapi harus mampu mengubah cara berpikir dan membuka kesadaran kritis masyarakat. Ia sangat dipengaruhi oleh pemikiran pendidikan kritis, di mana pendidikan seharusnya menjadi alat emansipasi dan pembebasan dari ketidakadilan struktural. Oleh sebab itu, ia memandang bahwa pemerataan pendidikan tidak akan tercapai jika sistem yang melingkupinya masih menindas, diskriminatif, dan tidak berpihak pada kelompok lemah. (Muttaqin, 2017)

Gagasan Abdul Mu'ti tentang pemerataan pendidikan berkualitas mencerminkan pendekatan yang lebih holistik, partisipatif, dan kontekstual. Ia tidak melihat pendidikan sebagai sistem teknis semata, tetapi sebagai bagian dari perjuangan sosial yang lebih luas. Pemerataan, menurutnya, harus dilihat sebagai keadilan sosial dalam bidang pendidikan, yang tidak hanya ditandai dengan angka statistik, tetapi juga dengan bagaimana pendidikan mampu mengubah nasib dan martabat manusia.

Dengan demikian, kontribusi pemikiran Abdul Mu'ti dalam wacana pemerataan pendidikan sangat penting untuk dijadikan

landasan alternatif terhadap pendekatan negara yang cenderung struktural. Pendekatannya yang menekankan pemberdayaan masyarakat, pembebasan nilai, dan fleksibilitas sistem pendidikan sangat sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan, khususnya bagi kelompok yang selama ini tertinggal oleh arus utama pembangunan pendidikan nasional. (Sumarta et al., 2025)

C. Implementasi Sekolah Rakyat sebagai Pendidikan Alternatif

Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk pendidikan alternatif yang tumbuh dari kesadaran masyarakat akan perlunya sistem pendidikan yang inklusif, kontekstual, dan terjangkau oleh semua kalangan. Berbeda dengan sistem pendidikan formal yang terikat pada regulasi negara, Sekolah Rakyat bersifat fleksibel, adaptif, dan umumnya berbasis komunitas. Implementasi Sekolah Rakyat muncul sebagai respons terhadap kegagalan sistem pendidikan konvensional dalam menjangkau masyarakat marginal, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun sosial-budaya.

Secara umum, Sekolah Rakyat berusaha menjembatani kesenjangan akses dan mutu pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan di kalangan masyarakat miskin. Bentuk implementasinya sangat beragam, mulai dari kelas belajar informal di rumah warga, balai desa, hingga ruang terbuka yang difungsikan sebagai tempat belajar. Metode pembelajaran yang digunakan pun berbeda dari sekolah formal, karena lebih menekankan pada pendekatan partisipatif, dialogis, dan berbasis pengalaman hidup peserta didik. (Maulidiah et al., 2017)

Salah satu keunikan dari Sekolah Rakyat adalah ketiadaan kurikulum baku dari pemerintah. Kurikulum dirancang secara

kontekstual berdasarkan kebutuhan, potensi, dan masalah yang dihadapi masyarakat sekitar. Misalnya, di daerah pertanian, pembelajaran lebih banyak mengangkat tema-tema pertanian berkelanjutan, pengelolaan hasil tani, dan kewirausahaan lokal. Hal ini bertujuan agar ilmu yang diajarkan tidak terlepas dari realitas kehidupan peserta didik. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memberdayakan.

Guru atau fasilitator di Sekolah Rakyat umumnya adalah relawan dari kalangan mahasiswa, aktivis pendidikan, atau warga yang memiliki kepedulian sosial tinggi. Mereka tidak selalu memiliki latar belakang pendidikan formal sebagai pengajar, tetapi berbekal semangat dan pemahaman akan konteks lokal. Proses pembelajaran yang mereka lakukan lebih bersifat horizontal, tidak menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai pendamping belajar. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan kritis, yang menolak relasi otoriter antara guru dan murid. (Shohibuddin & Maimun, 2025)

Implementasi Sekolah Rakyat juga menekankan pada pendidikan karakter dan kesadaran sosial. Dalam banyak kasus, peserta didik diajak untuk berdiskusi tentang hak-hak dasar manusia, isu lingkungan, keadilan sosial, dan pentingnya kebersamaan. Sekolah ini menjadi ruang aman bagi anak-anak dari keluarga miskin, korban konflik, buruh migran, hingga anak jalanan untuk belajar tanpa tekanan administratif dan diskriminasi status sosial. Karena bersifat nonformal, proses penilaian tidak dilakukan melalui ujian akademik, tetapi melalui partisipasi aktif dan perubahan sikap yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sisi kelembagaan, Sekolah Rakyat biasanya tidak memiliki struktur formal yang kompleks. Pendanaannya berasal dari donasi

masyarakat, kerja sama dengan lembaga sosial, atau inisiatif gotong royong lokal. Meskipun sederhana, banyak Sekolah Rakyat yang berhasil bertahan dan berkembang karena memiliki dukungan kuat dari masyarakat dan jaringan sosial yang luas. Beberapa di antaranya bahkan telah bermitra dengan LSM, perguruan tinggi, dan lembaga keagamaan untuk memperkuat kapasitas pendidikan mereka. (Deviyanti et al., 2022)

Sebagai pendidikan alternatif, Sekolah Rakyat tidak dimaksudkan untuk menggantikan pendidikan formal, tetapi melengkapinya. Ia menjadi pengingat bahwa pendidikan sejati bukan hanya tentang ijazah dan standar nilai, tetapi tentang bagaimana manusia diberdayakan dan dimanusiakan. Maka dari itu, Sekolah Rakyat dapat dijadikan model inspiratif dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

D. Perbandingan Gagasan dan Relevansi Terhadap Sekolah Rakyat

Gagasan tentang pemerataan pendidikan berkualitas dari Muhammad Nuh dan Abdul Mu'ti menunjukkan dua pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Keduanya memiliki fokus dan strategi masing-masing dalam memahami dan mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia. Perbandingan pemikiran keduanya menjadi penting untuk melihat bagaimana Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan alternatif dapat menjadi ruang implementasi yang relevan bagi keduanya, meskipun dari jalur dan pendekatan yang berbeda. (Simarmata et al., 2024)

Muhammad Nuh mewakili pendekatan negara atau kebijakan makro yang struktural dan sistemik. Ia melihat pemerataan pendidikan sebagai tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan melalui program-program strategis seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah),

sertifikasi guru, dan pengembangan teknologi pendidikan. Fokus utamanya adalah menciptakan sistem pendidikan nasional yang terstandarisasi, efisien, dan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya sistem evaluasi nasional seperti Ujian Nasional (UN) pada masanya, ia berupaya membangun kesetaraan dalam mutu pendidikan antardaerah. Dalam hal ini, pemerataan pendidikan dicapai melalui intervensi kebijakan yang bersifat top-down. (Nuh, 2018)

Sementara itu, Abdul Mu'ti menekankan pendekatan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berbasis masyarakat. Ia berpandangan bahwa pendidikan tidak bisa hanya dilihat sebagai kebijakan negara, tetapi harus menjadi gerakan sosial yang menyentuh aspek nilai, budaya, dan spiritualitas. Menurutnya, pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses fisik atau kuantitas, tetapi juga kualitas relasi sosial, keadilan nilai, dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan lokal. Dalam hal ini, masyarakat harus dilibatkan secara aktif, dan lembaga-lembaga keagamaan serta sosial memiliki peran penting dalam menyediakan pendidikan yang membebaskan dan membangun karakter. (Hafiz et al., 2024)

Dalam konteks tersebut, Sekolah Rakyat menjadi titik temu antara kedua gagasan. Dari sisi Muhammad Nuh, Sekolah Rakyat dapat dilihat sebagai ruang yang membutuhkan dukungan kebijakan agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Melalui bantuan dana, pelatihan guru, dan pengakuan legalitas pendidikan nonformal, negara dapat memperkuat daya jangkauan pendidikan alternatif ini. Konsep pemerataan dalam pendekatan Muhammad Nuh, jika diterapkan dengan fleksibel, dapat menjadi fondasi struktural bagi penguatan Sekolah Rakyat, khususnya dalam hal pembiayaan, fasilitas, dan pengakuan mutu.

Sebaliknya, dari perspektif Abdul Mu'ti, Sekolah Rakyat adalah representasi nyata dari pendidikan yang berbasis masyarakat. Ia mencerminkan nilai-nilai partisipasi, solidaritas, dan pembebasan dari ketidakadilan pendidikan. Sekolah Rakyat tidak dibatasi oleh kurikulum nasional yang kaku, tetapi dirancang sesuai kebutuhan lokal, dengan pendekatan pengajaran yang lebih dialogis dan humanis. Model ini sangat relevan dengan pemikiran Abdul Mu'ti yang mengedepankan pendidikan transformatif yang mampu membentuk kesadaran kritis dan memperjuangkan keadilan sosial. (Firmansyah, 2021)

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada orientasi aktor pendidikan. Muhammad Nuh melihat negara sebagai motor utama perubahan, sedangkan Abdul Mu'ti melihat masyarakat sebagai kekuatan utama. Meskipun berbeda, keduanya dapat saling melengkapi. Sekolah Rakyat dapat menjadi jembatan antara kekuatan struktural negara dan kekuatan sosial masyarakat. Negara menyediakan dukungan regulatif dan fasilitas, sementara masyarakat menjaga ruh pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan.

Dari sisi relevansi, pemikiran Muhammad Nuh memberi peluang agar Sekolah Rakyat lebih diakui dan didukung secara formal. Hal ini penting agar pendidikan alternatif ini tidak tersisih dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional tanpa kehilangan karakteristik khasnya. Sementara itu, pemikiran Abdul Mu'ti memastikan bahwa Sekolah Rakyat tetap membumi, tidak terjebak dalam birokrasi, dan terus menyuarakan nilai-nilai keadilan, empati, dan kebersamaan. (Sugara et al., 2024)

Dengan demikian, perbandingan gagasan Muhammad Nuh dan Abdul Mu'ti menunjukkan dua pendekatan penting dalam melihat peran Sekolah Rakyat. Keduanya tidak harus saling

bertentangan, melainkan bisa dikolaborasikan. Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan struktural dari negara, namun juga harus tetap dijaga nilai-nilai kemasyarakatannya. Pendekatan hibrid inilah yang dapat menjadi solusi dalam membangun sistem pendidikan Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa baik Muhammad Nuh maupun Abdul Mu'ti memiliki kontribusi pemikiran yang signifikan dalam wacana pemerataan pendidikan di Indonesia, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Muhammad Nuh menekankan pada penguatan sistem pendidikan nasional melalui kebijakan negara yang terstruktur, seperti peningkatan anggaran pendidikan, standarisasi mutu, serta pemanfaatan teknologi sebagai sarana pemerataan. Sementara itu, Abdul Mu'ti lebih menekankan pada pendidikan berbasis nilai, partisipasi masyarakat, serta relevansi sosial dan budaya dalam proses pembelajaran.

Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan alternatif memiliki keterkaitan kuat dengan pemikiran Abdul Mu'ti, karena pendekatan yang digunakan menekankan pada partisipasi komunitas, keadilan sosial, dan pendidikan yang membebaskan. Namun, keberlanjutan dan penguatan Sekolah Rakyat juga dapat didukung oleh pendekatan struktural sebagaimana digagas oleh Muhammad Nuh, khususnya dalam aspek pendanaan, pelatihan tenaga pengajar, dan legalitas kelembagaan.

Dengan demikian, kolaborasi antara pendekatan kebijakan negara dan pendekatan berbasis masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia. Sekolah Rakyat dapat menjadi ruang alternatif yang mengintegrasikan nilai-

nilai keadilan sosial dan sistem dukungan formal untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, relevan, dan berkelanjutan.

Saran

- 1) Pemerintah diharapkan memberikan pengakuan resmi terhadap keberadaan dan peran Sekolah Rakyat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tanpa menghilangkan fleksibilitas dan kekhasan lokalnya.
- 2) Lembaga pendidikan formal dan nonformal perlu saling bekerja sama untuk menciptakan model pendidikan hybrid yang mampu menjangkau kelompok masyarakat marginal secara efektif.
- 3) Perlu adanya pelatihan dan pendampingan bagi fasilitator Sekolah Rakyat agar mampu mengembangkan metode pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif, sekaligus tetap menjaga mutu pendidikan
- 4) Akademisi dan peneliti didorong untuk terus mengkaji serta mendokumentasikan praktik-praktik baik dari Sekolah Rakyat sebagai bahan pengembangan kebijakan pendidikan alternatif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin, M. (2020). *Kebangkitan pendidikan keagamaan: Pendidikan mu'adalah dalam konteks sistem pendidikan nasional* [masterThesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51293>

Anwar, A. S., & Mubin, F. (2022). REAKTUALISASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN ISLAM PADA MADRASAH UNGGULAN

(Pengembangan dan Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan). *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 4(03), Article 03.

<https://doi.org/10.36671/andragogi.v4i03.339>

Arifin, F. (2023). *Metode Sejarah: Merencanakan dan Menulis Penelitian Sejarah*. Deepublish.

Asyibli, B., Maulida, R. S., Zohriah, A., & Bachtiar, M. (2025). Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Satuan Pendidikan. *Jurnal Kependidikan*, 13(1), 75–98. <https://doi.org/10.24090/jk.v13i1.13393>

Deviyanti, S., Sukmana, E., & Yuliani, Y. (2022). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM CERITA RAKYAT SASAKALA DARMARAJA SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN PEMBELAJARAN APRESIASI SASTRA

DI SEKOLAH. *Literat - Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1(2), Article 2.

dkk, N. A., & Maryani, I. (2021). *Peran Guru dalam Membentuk Karakter Siswa (Antologi Esai Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar)*. UAD PRESS.

FADHLULLAH, I. (n.d.). *Pengaruh Pendidikan Karakter Dan Kepribadian Guru Terhadap Kepribadian Siswa (Studi Kasus Sekolah SL)*. GUEPEDIA.

Firmansyah, F. (2021). KELAS BERSAMA DALAM MEWUJUDKAN NILAI-NILAI MODERASI PENDIDIKAN ISLAM MELALUI BUDAYA SEKOLAH MULTIKULTURAL. *Turatsuna: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 3(2), Article 2

Hafiz, A., Mu'ti, A., & Amirrachman, A. (2024). Dakwah dalam Perspektif Pendidikan: Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Proses Pembelajaran dan Peran Kecerdasan Buatan dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran. *Rayah Al-Islam*, 8(3), Article 3.

<https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1063> Lubis, R. R. (2018). HISTORISITAS DAN

- DINAMIKA PENDIDIKAN KARAKTER DI INDONESIA. *An-Nahdhah: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Keagamaan*, 1(2), Article 2.
- Ma'ruf, M. (2021). *Studi Komparatif Corak Pendidikan Humanisme Rekonstruksionis Ki Hajar Dewantara Dan Paulo Freire Dalam Mengatasi Krisis Moral Siswa Di Indonesia* [Diploma, IAIN PONOROGO]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/16986/>
- Maulidiah, K., Aisyah, S., & Nasrudin, M. (2017). Sekolah Pasar Rakyat Sambilegi, Alternatif Pendidikan Agama Islam Dalam Masyarakat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 7(1), 31–44. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.1.82>
- Muttaqin, M. (2017). Pemikiran dan Manajemen Pendidikan Nu dan Muhammadiyah. *Nur El-Islam*, 4(1), 1–39.
- Nuh, Z. M. (2018). PENDIDIKAN HUMANISTIK; Mengenal Pendekatan Multiple Intelligences dalam Pendidikan Islam. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.24014/jiik.v8i2.5698>
- Rina, H., Setiawati, B., & Subadi, W. (2018). EVALUASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TANJUNG KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 1(1), Article 1
- Rohendi, E. (2011). Pendidikan Karakter Di Sekolah. *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.17509/eh.v3i1.2795>
- Rosyadi, A. R., Supriadi, D., & Rabbanie, M. D. (2021). Tinjauan Terhadap Tripusat Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(02), Article 02. <https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.1329>
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). PROGRAM ZONASI DI SEKOLAH DASAR SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>
- Shohibuddin, M., & Maimun, M. (2025). Sekolah Rakyat sebagai Alternatif Pendidikan di Indonesia pada Masa Kolonial. *Journal of Linguistics and Social Studies*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.52620/jls.v2i1.55>
- Simarmata, A., Purba, R. F. D., Simbolon, J., Siallagan, M., Purba, D., Damanik, W., & Panjaitan, P. D. (2024). MEMPERSIAPKAN GENERASI EMAS INDONESIA TAHUN 2045 MELALUI PROGRAM KAMPUS MENGAJAR. *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 5(1), 164–169. <https://doi.org/10.55943/jipmukjt.v5i1.203>
- Sugara, U., Supartinah, & Herwin. (2024). Persepsi Calon Guru Sekolah Dasar Terhadap Pengajaran Folklor: Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v9i2.5123>
- Sumarta, Edy, S., Rosidin, & Firmansyah, D. (2025). Shifting, Not Changing: Adaptive Continuity in Indonesia's Educational Policy Innovation Toward Quality Learning. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.61166/lpki.v1i2.11>
- Suryana, S. (2020). PERMASALAHAN MUTU PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN PENDIDIKAN. *Edukasi*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971>
- Tamimah, H., & Nuh, M. (2023). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA PASCA PANDEMI COVID-19. *Euclid*, 10(2), Article 2.
- Zakaria, M. (2018). Pendidikan dan Realitas Sosial (Analisis Struktur Konflik). *eL- HIKMAH: Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 21(2), Article 2.

Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan

Islam, 12(2), Article 2.

<https://doi.org/10.20414/elhikmah.v12i2.243>